



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014 -2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 - 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah

Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

Merubah Lampiran I dan II Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN
2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TANGERANG TAHUN 2014 – 2018

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Terwujudnya penataan pertanahan yang berkualitas	Luas lahan bersertifikat (Rasio luas lahan bersertifikat terhadap total jumlah luas lahan yang seharusnya bersertifikat)
		Penyelesaian kasus tanah negara (Rasio jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan terhadap jumlah kasus tanah negara yang terdaftar)
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima	Cakupan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran dan akta kematian
3	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, komunikatif, koordinatif, integratif, sederhana dan sinergis	Nilai/skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) minimal B
		Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas, sistem manajemen dan administrasi keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Jumlah pendapatan daerah
		Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)
		Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
5	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel	Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah
		Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B
6	Terwujudnya SDM aparatur yang profesional yang didukung dengan manajemen dan administrasi kepegawaian yang berkualitas	Nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai (SKP)
		Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
7	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	Tingkat ketersediaan data/informasi statistik daerah tepat waktu
		Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
8	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
		Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD
		Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD
		Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan
9	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD (Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada)
10	Terwujudnya pendayagunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, terintegrasi, terstandarisasi dan memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Tingkat pelayanan publik yang menggunakan media informasi berbasis teknologi informasi
		Tingkat integrasi sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
11	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian berbasis sumberdaya lokal	Persentase UMKM aktif
		Persentase koperasi aktif

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
12	Terwujudnya peningkatan penanaman modal (investasi), perijinan serta iklim investasi yang kondusif	Jumlah penanaman modal (investasi)
		Tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu
13	Terwujudnya ketahanan pangan yang didukung ketersediaan produk pertanian dan perikanan serta distribusi pangan yang memadai dan berkualitas	Tingkat Ketersediaan, Cadangan, Distribusi, Akses, Penganekaragaman, Keamanan, dan Penanganan Kerawanan Pangan
		Produksi pertanian :
		Produksi padi
		Produksi sayuran dan buah-buahan
		Produksi tanaman bio farmaka
		Produktivitas pertanian :
		Produktivitas padi
		Produktivitas sayuran dan buah-buahan
		Produktivitas tanaman bio farmaka
		Populasi ternak
		Produksi daging Produksi ikan budidaya darat (air tawar)
14	Terwujudnya kepariwisataan yang inovatif dan mempesona	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)
15	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	Persentase wajib tera (jumlah wajib tera yang dilaksanakan terhadap jumlah wajib tera)
		Rasio pasar tradisional yang modern, bersih dan sehat terhadap total jumlah pasar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
16	Terwujudnya industri yang maju serta peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah	Persentase industri yang memiliki gugus kendali mutu (Pengukuran standarisasi, pengujian, dan kualitas)
		Persentase IKM memiliki izin usaha industri kecil melalui PIRT dan halal

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
17	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berdaya saing yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan	Indeks pendidikan
		Harapan lama sekolah
		Rata-rata lama sekolah
		Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun
18	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks kesehatan
		Angka harapan hidup
		Presentase balita gizi buruk (BB/TB)
19	Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan gender
		Indeks pemberdayaan gender
		Persentase indikator kota layak anak yang terpenuhi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
20	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (Prevalensi peserta KB aktif)
21	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Persentase posyandu aktif
		Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada)
22	Terwujudnya ketenagakerjaan yang berkualitas dan berbasis keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tingkat penempatan tenaga kerja)
		Jumlah lowongan kerja
23	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah
		Cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya
24	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan
		Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan
		Cakupan gedung olahraga di setiap kecamatan
25	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Tingkat penyelesaian konflik SARA
		Tingkat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
26	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat aktif
27	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
28	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan yang memadai	Luas genangan dan banjir
29	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang memadai dan berkualitas	Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang
		Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota
30	Terwujudnya sistem dan manajemen pelayanan transportasi perkotaan yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai	Jumlah titik kemacetan
		Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
31	Terwujudnya peningkatan mitigasi, pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana	Tingkat penanganan lokasi bencana Tingkat penanganan korban bencana
32	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat, aman, dan nyaman	Backlog rumah Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Luas lingkungan permukiman kumuh Rumah layak huni (Proporsi jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah yang ada)
33	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
34	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Kategori Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN
2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
TANGERANG TAHUN 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, komunikatif; koordinatif, integratif, sederhana dan sinergis	Persentase SKPD/PD pelayanan publik yang memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) minimal B	%	Jumlah SKPD pelayanan publik yang memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dibagi Jumlah SKPD pelayanan publik yang ada	Semakin tinggi nilai IKM maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, komunikatif; koordinatif, integratif, sederhana dan sinergis	Raperda yang disetujui DPRD tahun berkenan (Proporsi jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda terhadap jumlah Raperda yang diusulkan)	%	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD menjadi Perda dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan	Hasil Pembahasan Raperda dengan DPRD yang disetujui

3. Inspektorat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel	Tingkat tindak lanjut laporan hasil expose temuan hasil pengawasan	%	Jumlah temuan hasil pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota) yang telah ditindaklanjuti dibagi Jumlah total temuan hasil pengawasan	IKK LPPD
		Persentase SKPD/PD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B	%	Jumlah SKPD/PD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B dibagi Jumlah SKPD/PD yang ada	SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B

4. Dinas Pendidikan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau, bermutu dan berdaya saing yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan	Indeks pendidikan	Point	Indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	Indeks komposit pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka HLS dihitung dari data penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	Indeks komposit pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir
		Angka melek huruf penduduk usia >15 tahun	%	penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

5. Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks kesehatan	Point	Indeks Kesehatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		Angka harapan hidup (AHH)	Tahun	rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 100.000 KH	Cakupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan
		Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 1000 KH	Cakupan penurunan jumlah kematian bayi
		Prevalensi balita gizi kurang (BB/U)	%	Jumlah balita gizi kurang (BB/U) dibagi Jumlah seluruh balita yang ada	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita
		Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	Jumlah balita gizi buruk (BB/TB) dibagi Jumlah seluruh balita yang ada	

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
-----	---------	-------------------------	--------	----------------------------	------------

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan yang memadai	Luas genangan	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Penanganan banjir sampai tuntas sehingga luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang akan berkurang
		Luas banjir	Ha		
2	Terwujudnya jaringan jalan dan sarana pendukungnya yang memadai dan berkualitas	Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang	%	Panjang jalan kota yang memenuhi kondisi jalan yang baik dan sedang dibagi Jumlah panjang jalan kota keseluruhan	kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
		Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	%	Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi Target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi	
3	Terwujudnya penataan ruang wilayah yang berkualitas	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	Jumlah peta analog/digital RTRW dan RDTR yang tersedia dibagi Jumlah peta analog/digital RTRW dan RDTR yang seharusnya tersedia	UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat, aman, dan nyaman	Backlog rumah	%	Jumlah rumah yang tersedia dibagi Jumlah seluruh kebutuhan rumah yang seharusnya tersedia	untuk melihat kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	Jumlah masyarakat (penduduk) yang mendapatkan akses pelayanan (terlayani) air minum SPAM yang aman baik perpipaan maupun non perpipaan dibagi Total jumlah penduduk kota (total jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses pelayanan (terlayani) air minum SPAM yang aman baik perpipaan maupun non perpipaan)	Memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	Jumlah penduduk yang terlayani septick tank/MCK dibagi Total jumlah penduduk kota	PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rumah layak huni (Proporsi jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah yang ada)	%	Jumlah rumah layak huni dibagi Total jumlah rumah yang ada	Permendagri 54 Tahun 2010

8. Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Tingkat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan pada tahun x dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau pada tahun x	Tujuan Penegakan Peraturan Daerah adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi atau mentaati dan memberikan efek jera kepada masyarakat atas tindakannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah

9. Dinas Sosial

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
		Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada)	%	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani dibagi Total jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada	

10. Dinas Ketenagakerjaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya ketenagakerjaan yang berkualitas dan berbasis keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (tingkat penempatan tenaga kerja)	%	Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan dibagi Banyaknya pencari kerja terdaftar	Permennaker Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang SPM bidang Ketenagakerjaan
		Jumlah lowongan kerja	Orang	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	Jumlah lowongan kerja di Kota Tangerang

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga	Indeks pembangunan gender (IPD)	Point	rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki	Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan
		Indeks pemberdayaan gender	Point	persentase perempuan yang duduk di parlemen, yang menjadi administrator dan manajer serta tenaga profesional dan pekerja teknis dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja bila dibandingkan dengan persentase laki-laki	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari tiga komponen: yaitu perwakilan di DPR, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Persentase indikator kota layak anak yang terpenuhi	%	Jumlah indikator kota layak anak yang telah terpenuhi sesuai standar peraturan yang berlaku dibagi Jumlah seluruh indikator kota layak anak yang seharusnya terpenuhi sesuai standar peraturan yang berlaku	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
2	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (Prevalensi peserta KB aktif)	%	Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif dibagi Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya 15-49 tahun	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota
Persentase posyandu aktif		%	Jumlah posyandu yang aktif dibagi Jumlah seluruh posyandu yang ada		
Proporsi jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I terhadap total jumlah keluarga yang ada		%	Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dibagi Total jumlah keluarga yang ada		

12. Dinas Ketahanan Pangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya ketahanan pangan yang didukung ketersediaan produk pertanian dan perikanan serta distribusi pangan yang memadai dan berkualitas	Tingkat Ketersediaan, Cadangan, Distribusi, Akses, Penganekaragaman, Keamanan, dan Penanganan Kerawanan Pangan	%	Rata-rata nilai Tingkat Ketersediaan, Cadangan, Distribusi, Akses, Penganekaragaman, Keamanan, dan Penanganan Kerawanan Pangan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
		Produksi pertanian :			
		Produksi padi	Ton	Jumlah produksi padi	
		Produksi sayuran dan buah-buahan	Ton	Jumlah produksi sayuran (petsai/sawi, kangkung dan bayam) dan buah-buahan (belimbing, jambu biji, jambu air, mangga, pepaya dan pisang)	
		Produksi tanaman bio farmaka	Kg	Jumlah produksi tanaman bio farmaka (jahe, laos, temu lawak, temu ireng, mengkudu, dan sambiloto)	
		Produksi tanaman hias	Kg	Jumlah produksi tanaman hias (phytodendron)	
		Produktivitas pertanian :			
		Produktivitas padi	Kw/Ha	Jumlah produksi padi (Kw) dibagi Luas Panen (Ha)	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Produktivitas sayuran dan buah-buahan	Kw/Ha	Jumlah produksi sayuran (petai/sawi, kangkung dan bayam) dan buah-buahan (belimbing, jambu biji, jambu air, mangga, pepaya dan pisang) (Kw) dibagi Luas Panen (Ha)	
		Produktivitas tanaman bio farmaka	Kg/m ²	Jumlah produksi tanaman bio farmaka (jahe, laos, temu lawak, temu ireng, mengkudu, dan sambiloto) (Kg) dibagi Luas Panen (m ²)	
		Produktivitas tanaman hias	Kg/m ²	Jumlah produksi tanaman hias (phytodendron) (kg) dibagi Luas Panen (m ²)	
		Populasi ternak	Ekor	Jumlah populasi ternak (sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging, itik)	
		Produksi daging	Ton	Jumlah produksi daging (sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, ayam ras pedaging, itik)	
		Produksi ikan budidaya darat (air tawar)	Ton	Jumlah produksi ikan budidaya darat (air tawar) (lele, nila)	
		Produksi ikan hias	Ton	Jumlah produksi ikan hias (gapi, setan (hantu), cupang, manfish, moli, mas koki, plati)	

13. Dinas Pertanahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya penataan pertanahan yang berkualitas	Luas lahan bersertifikat (Rasio luas lahan bersertifikat terhadap total jumlah luas lahan yang seharusnya bersertifikat)	%	untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah (km ²) dibagi Luas wilayah kota Tangerang (di luar luas Bandara Soekarno Hatta) (km ²)	Berdasarkan PP 6 Tahun 2008, untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah
		Penyelesaian kasus tanah negara (Rasio jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan terhadap jumlah kasus tanah negara yang terdaftar)	% per tahun	Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan dibagi Jumlah kasus tanah negara yang terdaftar	

14. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Kategori Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	(U, SB, B, C, K, SK, W)	Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	ukuran utama untuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kota Tangerang 2014-2018
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	Luasan RTH publik yang tersedia dibagi Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia	UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi Jumlah total penduduk kota	Permendagri 54 Tahun 2010

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima	Cakupan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran dan akta kematian	%	Rata-rata nilai cakupan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran dan akta kematian	SPM (Kumulatif)
		Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	Jumlah kartu keluarga (KK) yang diterbitkan pada tahun x dibagi Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun x	
		Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	%	Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan pada tahun x dibagi Jumlah wajib KTP elektronik pada tahun x	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	%	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x dibagi Jumlah wajib KTP elektronik pada tahun x	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%	Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x) dibagi Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)	

16. Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya sistem dan manajemen pelayanan transportasi perkotaan yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai	Jumlah titik kemacetan	Titik	Jumlah titik kemacetan	
		Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	Koridor	Jumlah koridor angkutan umum masal yang beroperasi	

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya statistik dan persandian yang berkualitas	Tingkat ketersediaan data/informasi statistik daerah tepat waktu	%	Jumlah data/informasi statistik yang tersedia tepat waktu dibagi Jumlah data/informasi statistik yang tersedia	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		Persentase penggunaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	%	Jumlah informasi pemerintah daerah yang menggunakan sandi pengaman dibagi Jumlah informasi pemerintah daerah yang ada	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2	Terwujudnya pendayagunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, terintegrasi, terstandarisasi dan memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Tingkat pelayanan publik yang menggunakan media informasi berbasis teknologi informasi	%	Jumlah pelayanan publik yang menggunakan media informasi berbasis teknologi informasi dibagi Jumlah pelayanan publik yang ada	
		Tingkat integrasi sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah terintegrasi dibagi Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada	

18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya perdagangan yang berkualitas serta peningkatan perlindungan konsumen	Persentase wajib tera (jumlah wajib tera yang dilaksanakan terhadap jumlah wajib tera)	%	Jumlah wajib tera yang telah diperiksa dibagi Jumlah wajib tera yang seharusnya dilaksanakan pemeriksaan	
		Rasio pasar tradisional yang modern, bersih dan sehat terhadap total jumlah pasar	%	Jumlah pasar tradisional yang modern, bersih dan sehat dibagi Jumlah pasar tradisional yang ada	
2	Terwujudnya industri yang maju serta peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah	Persentase industri yang memiliki gugus kendali mutu (Pengukuran standarisasi, pengujian, dan kualitas)	%	Jumlah industri yang memiliki gugus kendali mutu (pengukuran standarisasi, pengujian, dan kualitas) dibagi Jumlah seluruh industri yang ada	
		Persentase IKM memiliki izin usaha industri kecil melalui PIRT dan halal	%	Jumlah IKM yang memiliki izin usaha industri kecil (PIRT dan halal) dibagi Jumlah seluruh IKM yang ada	

19. Dinas Koperasi dan UKM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya keberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai pendukung perekonomian berbasis sumberdaya lokal	Persentase UMKM aktif	% per tahun	Jumlah UMKM yang aktif dibagi Jumlah UMKM yang ada	
		Persentase koperasi aktif	%	Jumlah koperasi yang aktif dibagi Jumlah koperasi yang ada	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan penanaman modal (investasi), perijinan serta iklim investasi yang kondusif	Jumlah penanaman modal (investasi)	Rp. Triliun	Jumlah nilai penanaman modal (investasi) PMA dan PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100%
		Tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu	%	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perijinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku	

21. Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi	Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	%	Jumlah organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan dibagi Jumlah seluruh organisasi pemuda yang ada	
		Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	%	Jumlah organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan dibagi Jumlah seluruh organisasi olahraga yang ada	
		Cakupan gedung olahraga di setiap kecamatan	Unit/ kecamatan	Jumlah gedung olahraga dibagi Jumlah kecamatan	

22. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya kepariwisataan yang inovatif dan mempesona	Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel)	Hari	Jumlah lamanya hari tamu yang menginap di hotel (hari) dibagi Jumlah tamu yang menginap di hotel (orang)	
2	Terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah	%	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang dilestarikan dibagi Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada	
		Cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya	%	Nilai rata-rata cakupan SDM, organisasi, pelestarian, kajian, fasilitasi, gelar, misi dan tempat kesenian dan budaya	Indikator SPM (SPM Kumulatif)

23. Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya kearsipan yang berkualitas	Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD (Rasio jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku terhadap total jumlah SKPD yang ada)	%	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi Jumlah SKPD yang ada	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
2	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Orang	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	

24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya sistem dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, komunikatif; koordinatif, integratif, sederhana dan sinergis	Nilai/skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Poin	<p>Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.</p>	<p>Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya
2	Terwujudnya perencanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Jumlah program dalam RKPD dibagi Jumlah program dalam RPJMD	Keselarasan antar dokumen perencanaan, program program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)
Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD		%	Jumlah program Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi Jumlah program dalam RPJMD	sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri 54 Tahun 2010)	
Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD		%	Jumlah program Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dibagi Jumlah program dalam RKPD	sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri 54 Tahun 2010)	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan strategis dalam perencanaan pembangunan	% per tahun	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ada	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

25. Badan Pengelola Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas, sistem manajemen dan administrasi keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang
		Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang
		Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi Jumlah pendapatan daerah	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

26. Badan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas, sistem manajemen dan administrasi keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Jumlah pendapatan daerah	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Rp. Triliun	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD)	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola yang Badan Pendapatan Daerah
		Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	%	Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dibagi Jumlah pendapatan daerah	

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya SDM aparatur yang profesional yang didukung dengan manajemen dan administrasi kepegawaian yang berkualitas	Nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai (SKP)	Poin	Jumlah nilai sasaran kinerja pegawai (SKP) seluruh aparat sipil negara (ASN) yang dinilai dibagi Jumlah aparat sipil negara (ASN) yang dinilai	PP No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
		Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah	%	Jumlah aparat sipil negara (ASN) yang tidak melakukan pelanggaran disiplin dibagi Jumlah aparat sipil negara (ASN) yang ada	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan mitigasi, pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana	Tingkat penanganan lokasi bencana	%	Jumlah lokasi bencana yang ditangani dibagi Jumlah keseluruhan lokasi bencana	
		Tingkat penanganan korban bencana	%	Jumlah korban bencana yang ditangani dibagi Jumlah keseluruhan korban bencana	

29. Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 100.000 KH	Cakupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
		Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 1000 KH	Cakupan penurunan jumlah kematian bayi
		Prevalensi balita gizi kurang (BB/U)	%	Jumlah balita gizi kurang (BB/U) dibagi Jumlah seluruh balita yang ada	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita
		Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	Jumlah balita gizi buruk (BB/TB) dibagi Jumlah seluruh balita yang ada	

30. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Tingkat penyelesaian konflik SARA	%	Jumlah penyelesaian konflik SARA yang difasilitasi dibagi Jumlah konflik SARA yang terjadi	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
2	Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat aktif	%	Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan pada tahun x dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau pada tahun x	

31. Kecamatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima	Cakupan penerbitan kartu keluarga	%	Jumlah kartu keluarga (KK) yang diterbitkan pada tahun x dibagi Jumlah kepala keluarga dalam satu kecamatan pada tahun x	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota
		Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	%	Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan pada tahun x dibagi Jumlah wajib KTP elektronik pada tahun x	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Keterangan
2	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum	Tingkat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan pada tahun x dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau pada tahun x	
3	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	Jumlah usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang kecamatan dibagi Jumlah usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	
4	Terwujudnya peningkatan penanaman modal (investasi), perijinan serta iklim investasi yang kondusif	Tingkat pelayanan waktu pengurusan perizinan tepat waktu	%	Jumlah perijinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perijinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku	Pemerintah Kota Tangerang menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100%

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH